



Judul : DPR Emoh dituntut kejar setoran
Tanggal : Jumat, 26 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Emoh Dituntut Kejar Setoran

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengakui kinerja DPR pada bidang legislasi memang kerap menuai kritik dari masyarakat sipil, lantaran rendahnya pengesahan undang-undang (UU) yang dilakukan wakil rakyat.

Namun, ia menjelaskan parlemen modern tidak bertumpu terhadap kuantitas atau jumlah pengesahan UU. "Asumsi-asumsi yang berkembang di tengah publik selalu saja kita seperti sopir angkot, yang harus dikejar, yang harus diburu dengan setoran-setoran berapa undang-undang yang sudah diselesaikan," kata Willy di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengakui tingkat kepercayaan publik kepada DPR harus diakui masih sangat rendah dan butuh kerja keras, pembuktian dalam waktu yang tidak sebentar. Hal ini sebetulnya menjadi ironi sebab 570 anggota DPR sejatinya ialah orang yang mengantongi kepercayaan dari publik lewat pemilu.

"Masa lembaganya bisa tidak dipercaya. Saya melihat ini sebagai sebuah keinginan yang bagus apa yang harus dimiliki adalah keterbukaan dan keterbukaan adalah satu-satunya cara untuk kita menjaga kredibilitas kepercayaan dan atmosfer demokrasi.

Atmosfer demokrasi sangat penting di Indonesia," tukasnya.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto menyebutkan persepsi publik yang tidak baik atau negatif terhadap DPR disebabkan tiga faktor. Pertama, yakni kekuatan politik yang terfragmentasi yang memengaruhi komunikasi parlemen dengan publik sebagai lembaga politik.

"Kekuatan yang terfragmentasi itu menyebabkan suara yang tidak pernah satu. Itu kemudian mau dibuat komunikasi politik dan publik seperti apa pun akan selalu tersedia ruang yang begitu dahsyat mengkritik DPR," ujarnya.

Kedua, dia melihat ada persoalan kompleksitas relasi kuasa. Hal itu menjadi bacaan penting karena antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif publik banyak yang tidak mengetahuinya. Namun, sering tidak tersampaikan kepada publik yang kemudian memunculkan persepsi negatif terhadap DPR.

Ketiga, tentang performa komunikatif yang juga menjadi masalah kontekstual. Kondisi itu disebabkan dari 570 anggota wakil rakyat selalu ada jurang pemisah terkait dengan substansi, baik dari saat proses *input* maupun *output* dari sebuah produk. (Srw/P-2)